

ABSTRAK

Ashabul kahfi, 2025.*Tinjauan Hukum terhadap perlindungan hak milik atas tanah dalam hukum adat(studi kasus desa manjaling) kab. bulukumba.* Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Aulia Andika Rukman Sebagai Pembimbing I dan Muhajir Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah dalam perspektif hukum adat dengan fokus studi kasus di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Dalam masyarakat adat, hak milik atas tanah tidak hanya memiliki dimensi yuridis tetapi juga sosial dan kultural yang kuat, terutama terkait dengan sistem kepemilikan kolektif atau hak ulayat. Persoalan sengketa tanah di wilayah ini umumnya muncul dari konflik batas tanah, warisan, klaim ganda tanpa sertifikat sah, sering kali diselesaikan melalui mekanisme adat seperti musyawarah, mediasi oleh tokoh adat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dilakukan dalam kerangka hukum adat, mengkaji kesesuaian antara hukum adat dan hukum positif, serta menilai efektivitas bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam sistem hukum adat terhadap hak milik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah setempat, dan pihak-pihak pernah terlibat dalam sengketa tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Manjalling memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik kepemilikan tanah. Penyelesaian secara adat melalui musyawarah masih sangat efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan menjadi pilihan utama masyarakat dibanding jalur litigasi formal. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti ketidakhadiran salah satu pihak dalam musyawarah atau ketidaksamaan persepsi antar pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, hukum adat terbukti fleksibel dan adaptif, meskipun belum memiliki kekuatan pembuktian setara dengan sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional.

Terkait kesesuaian dengan hukum positif, hukum adat secara prinsipil tidak bertentangan dengan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan UUD 1945 yang menjamin hak milik setiap warga negara. Justru, hukum adat menjadi pelengkap dalam mewujudkan perlindungan hukum yang lebih kontekstual dan berkeadilan sosial bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, kolaborasi antara sistem hukum adat dan hukum nasional perlu diperkuat guna menciptakan jaminan hukum yang menyeluruh bagi masyarakat adat.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak milik atas tanah dalam hukum adat di Desa Manjalling berjalan cukup efektif meskipun menghadapi sejumlah tantangan. Upaya sinergis antara lembaga adat, masyarakat, dan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak milik di masa mendatang

Kata Kunci: *Hukum Adat, Hak Milik, Sengketa Tanah, Perlindungan Hukum*

ABSTRAK

Ashabul kahfi, 2025. *Legal Review of Land Ownership Rights Protection in Customary Law (Case Study of Manjalling Village) Bulukumba Regency.* Thesis. Department of Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Aulia Andika Rukman as Supervisor I and Muhajir as Supervisor II.

This study examines legal protection of land ownership rights from a customary law perspective with a case study focus in Manjalling Village, Ujung Loe District, Bulukumba Regency. In customary communities, land ownership rights not only have a strong legal but also social and cultural dimension, especially related to the collective ownership system or customary rights. Land disputes in this area generally arise from land boundary conflicts, inheritance, and multiple claims without valid certificates, and are often resolved through customary mechanisms such as deliberation and mediation by customary leaders.

The main objective of this study is to understand how the settlement of land ownership disputes is carried out within the framework of customary law, to examine the conformity between customary law and positive law, and to assess the effectiveness of the form of legal protection provided in the customary law system for property rights. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants in this study include community leaders, customary leaders, local government, and parties who have been involved in land disputes.

The results of the study show that customary law in Manjalling Village has an important role in resolving land ownership conflicts. Customary resolution through deliberation is still very effective in maintaining social harmony and is the main choice of the community compared to formal litigation. However, there are still obstacles such as the absence of one of the parties in the deliberation or differences in perception between the disputing parties. In this context, customary law has proven to be flexible and adaptive, although it does not yet have the same evidentiary power as a land ownership certificate from the National Land Agency. Regarding compliance with positive law, customary law in principle does not conflict with national law, especially the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960 and the 1945 Constitution which guarantees the property rights of every citizen. In fact, customary law is a complement in realizing more contextual and socially just legal protection for indigenous peoples. Therefore, collaboration between the customary law system and national law needs to be strengthened in order to create comprehensive legal guarantees for indigenous peoples.

Thus, it can be concluded that the protection of land ownership rights in customary law in Manjalling Village is quite effective despite facing a number of challenges. Synergistic efforts between customary institutions, communities, and local governments are needed to strengthen the legality and protection of property rights in the future.

Kata Kunci: *Customary Law, Property Rights, Land Disputes, Legal Protection*